

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Legitimasi

Legitimasi adalah persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan, pantas, atau sesuai dalam beberapa sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi yang dibangun secara sosial (Suchman, 1995). Teori legitimasi dalam menerapkan dan mengembangkan yang menjelaskan peranan perilaku organisasi untuk mengungkapkan informasi secara sukarela terkait informasi lingkungan dan sosial agar mencakup kontrak sosial untuk mendapatkan pengakuan dan kelangsungan suatu organisasi (Delgado & Castelo, 2013). Ketika aktivitas perusahaan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka muncul ancaman legitimasi. Teori legitimasi memberikan lensa teoretis untuk menguji interaksi antara media pelaporan perusahaan dan lingkungan fisik dan sosialnya (Owen, 2008). Sebagai prasyarat dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan yang berkelanjutan, teori legitimasi memberikan wawasan tentang mengapa organisasi sesuai dengan harapan masyarakat.

Teori legitimasi cocok digunakan dalam menganalisis pengungkapan yang dilakukan secara sukarela seperti pengungkapan anti korupsi, terdapat dua alasan utama mengapa hal ini dapat berlaku. Pertama, teori legitimasi memberikan perspektif komplementer dari teori stakeholder dan legitimasi tentang pengungkapan sukarela (Deegan & Unerman, 2011). Perusahaan menggunakan pengungkapan sukarela untuk mengatasi nilai ekonomi dan etika serta kepedulian

pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan terbesar atas kegiatan organisasi (Deegan & Unerman, 2011). Kedua teori legitimasi akan membantu menganalisis dan memahami persamaan dan perbedaan yang digabungkan dengan praktik organisasi seperti prosedur akuntansi dan pelaporan perusahaan dengan nilai perusahaan seperti masalah sosial dan budaya yang akan mempengaruhi perusahaan untuk mempertahankan legitimasinya dalam konteks negara berkembang (Joseph et al., 2016).

2.2 Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan bahwa biaya agensi dipengaruhi oleh suatu asimetri informasi melibatkan agen dan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Asimetri informasi yaitu keadaan dimana adanya kesenjangan informasi yang diperoleh principal dan agen, seperti ketika pemegang saham memiliki sedikit informasi sedangkan pihak manajemen perusahaan memiliki lebih banyak informasi. Mengurangi terjadinya asimetri informasi dan biaya agensi perlu adanya pengungkapan informasi yang terdapat di perusahaan mengenai rencana perusahaan dan pelaksanaan kebijakan yang telah dijalankan perusahaan (Kılıç & Kuzey, 2018). Nilai perusahaan dapat terpengaruh menjadi rendah menurut pemegang saham apabila perusahaan kurang memberikan informasi mereka, sehingga mengakibatkan harga saham rendah.

Teori agensi menggunakan pengungkapan sukarela sebagai mekanisme untuk mencegah antara manajemen (agen) dan pemegang saham atau publik (principal) untuk terhindar dari asimetri informasi. Teori ini dapat membantu perusahaan untuk membuat laporan perusahaan yang *forward looking disclosure*

untuk mengurangi biaya agensi dan menghindari terjadinya asimetri informasi (Kılıç & Kuzey, 2018). Emiten yang mengungkapkan informasi berguna dan memiliki dampak pada nilai perusahaan yang dapat dimanfaatkan para pemegang saham untuk membandingkan kinerja di masa datang perusahaan satu dengan perusahaan lainnya (Jensen & Meckling, 1976).

2.2 Sistem Pengendalian Internal

2.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yaitu bagian dan terintegrasi dengan proses manajemen (COSO, 2012). Salah satu indikator tindakan fraud yaitu pengendalian internal yang lemah, sehingga peluang terjadinya kecurangan sangat besar. Penipuan lebih sering terjadi ketika pengendalian internal diabaikan (Manning, 2005). Penerapan sistem pengendalian internal yang dijalankan pada perusahaan setidaknya membantu dalam memahami bagaimana tindakan kecurangan itu terjadi. Pemahaman tersebut diperlukan untuk menutupi kelemahan yang dapat dilakukan dengan mengungkapkan kebijakan tertentu untuk mengatasi kelemahan tersebut salah satunya yaitu pengungkapan kebijakan anti korupsi (Crain et al., 2015).

Hadirnya sistem pengendalian internal didalam perusahaan dapat membantu perusahaan untuk menghindari risiko yang melekat dalam perusahaan untuk tercapainya tujuan perusahaan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian (Graham, 2008). Sehingga, pengendalian internal dapat diartikan sebagai suatu untuk memberi jaminan yang memadai tercapainya kepatuhan pada regulasi yang

telah ditetapkan, keandalan laporan keuangan, dan efektifitas efisiensi operasi melalui suatu kebijakan, proses, dan metode yang direncanakan dan dibuat oleh manajemen dan personil beserta dewan komisaris.

2.2.2 Komponen Pengendalian Internal

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) pada tahun 1992, telah membuat kerangka kerja untuk dapat membantu menilai dan meningkatkan sistem pengendalian internal didalam perusahaan mereka (Hightower, 2005). Komponen-komponen kerangka kerja yang dirumuskan oleh COSO dipantau untuk membantu memastikan bahwa pengendalian terus beroperasi dengan baik dari waktu ke waktu. Komponen COSO meliputi:

1. Lingkungan pengendalian

Sikap manajemen, direktur, dan pemilik entitas harus dicerminkan dengan serangkaian prosedur, tindakan, dan kebijakan sehubungan dengan pengendalian internal dan kepentingan perusahaan. Pemahaman dan evaluasi untuk lingkungan kontrol, ada bagian komponen kontrol perlu untuk dipahami dan ditaati, yaitu:

- a. Komitmen kompetensi, dibutuhkan suatu keterampilan dalam menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- b. Nilai integritas dan etika, tindakan yang diambil meminimalisir godaan dan insentif dilakukan oleh manajemen yang dapat menyebabkan karyawan bertindak tidak jujur, melanggar hukum, atau tidak etis. Ini juga mencakup

mengkomunikasikan nilai-nilai entitas dan standar perilaku kepada karyawan melalui pernyataan kebijakan, kode etik, dan contoh.

- c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit memainkan peranan utama pada tata kelola perusahaan yang efektif, sebab organisasi memiliki kewajiban utama untuk menetapkan pelaksanaan telah dilakukan manajemen terhadap pengendalian internal dan laporan keuangan yang tepat.
- d. Praktik dan kebijakan sumber daya manusia
- e. Struktur organisasi, mendefinisikan jalur kewajiban dan wewenang
- f. Filosofi dan gaya operasi yang dijalankan oleh manajemen dapat memberikan penjelasan kepada karyawan kegunaan dari pentingnya pengendalian internal dijalankan pada perusahaan.

2. Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah cara untuk mengelola risiko agar dapat dikendalikan dengan mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat terjadi untuk mencapai tujuan perusahaan (Golden et al., 2006). Komponen ini membentuk dasar bagaimana risiko diidentifikasi, dikelola dan dilaporkan.

3. Aktivitas pengendalian

Proses operasional dan keuangan yang telah dijalankan di dalam perusahaan berdasarkan aktivitas pengendalian sehingga dapat menghindari dan mengatasi risiko untuk dapat meraih tujuan perusahaan. Kegiatan yang dibutuhkan pengendalian terdiri atas lima, antara lain:

- a. Persetujuan atas tiap aktivitas dan transaksi yang tepat

- b. Pembagian pekerjaan yang jelas
- c. Kontrol fisik aset dan catatan
- d. Audit operasional independen
- e. Catatan dan dokumentasi yang memadai

4. Informasi dan Komunikasi

Berhasil mengoperasikan dan mengendalikan bisnis biasanya memerlukan persiapan dan komunikasi informasi yang relevan dan tepat waktu (Golden et al., 2006). Fungsi ini sebagian tergantung pada bagaimana mengambil keputusan tepat dengan dibutuhkannya suatu sistem informasi yang mampu membuat laporan terkait data keuangan, kepatuhan, dan keuangan. Komunikasi yang dijalankan harus dilakukan dalam arti lebih luas mulai dari bawah, ke atas dan melintasi perusahaan sehingga pegawai memahami peran mereka sendiri untuk dapat berkomunikasi dengan pihak lainnya. Tetapi, harus ada komunikasi kuat dengan pihak luar misalnya pembuat kebijakan, pelanggan, investor, pemasok serta pemangku kepentingan lainnya.

5. Pengawasan

Mengacu pada proses yang menilai dan mengevaluasi efektivitas proses, efisiensi dan kepatuhan dalam menangani tujuan pengendalian internal. Termasuk dalam komponen monitor COSO adalah tanggung jawab untuk melaporkan postur pengendalian internal perusahaan dan pengendalian operasional yang diarahkan misalnya dapat menyesuaikan dengan situasi dan harapan yang diinginkan.

2.2.3. Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian internal terdapat pada entitas harus dijalankan selaras dengan tujuan yang telah didefinisikan di dalam tujuan dari pengendalian internal yang dibuat, adapun tujuan dari dibangunnya pengendalian internal sebagai berikut (Mardi, 2011):

- a. Membantu mempertahankan kebijakan yang telah ditetapkan
- b. Memverifikasi keakuratan dan kebenaran informasi akuntansi
- c. Unik menjaga keamanan aset perusahaan
- d. Meningkatkan efisiensi operasi organisasi

Faktor pendukung untuk dapat membangun pengendalian internal untuk mencapai suatu kondisi yang diinginkan oleh suatu entitas dibutuhkan suatu tujuan pengendalian internal yang baik, sementara itu menurut Mulyadi (2011) untuk membangun pengendalian internal yang baik terdapat tujuan dari sistem pengendalian internal, yaitu sebagai berikut::

- a. Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen
- b. Memverifikasi keakuratan dan keandalan data akuntansi
- c. Menjaga kekayaan organisasi
- d. Mendorong efisiensi

2.2.4 Pengendalian Internal yang Baik

Menurut Nugroho (2009), pengendalian internal yang efektif mencakup pemberian kepercayaan agar dapat meraih tujuan dari entitas. Hal ini mensyaratkan bahwa setiap elemen pengendalian internal bekerja sama dan prinsip serta fungsi terkait bekerja dalam kombinasi.

Pengendalian internal yang baik meliputi karakteristik antara lain: pada struktur organisasi, pencatatan dan proses otorisasi harus sesuai untuk pengendalian aset, pendapatan konsisten, kewajiban, dan harus orang berkompeten agar dapat dimiliki pemisahan tanggung jawab sesuai fungsinya (Tunggal, 2013). Seperti karyawan melakukan tugas dan tanggung jawabnya yang diamanahkan kepadanya.

Pengendalian internal yang baik, artinya organisasi harus memiliki struktur standar, sistem akuntansi yang memenuhi, sistem pembagian kekuasaan yang jelas, dan memiliki staf atau badan audit internal; dan Dewan Pembina adalah orang-orang yang memiliki keahlian dan melakukan aktivitas pada profesi masing-masing tersebut. Apabila bidang-bidang tersebut terpenuhi, maka terciptalah sistem pengendalian internal efektif yang membantu untuk mencapai tujuan dari organisasi.

2.2.5 Keterbatasan Pengendalian Internal

COSO 2013 menyoroti batas-batas tertentu dari pengendalian internal yaitu bahwa kerangka kerja memberikan keyakinan yang memadai dengan menyetujui sementara bahwa pengendalian internal dapat memberikan keyakinan tersebut. Pencapaian tujuan dari entitas memiliki adanya batasan. Keputusan ataupun

penilaian buruk terhadap pengendalian internal tidak dapat dicegah atau terdapat adanya peristiwa eksternal yang dapat mencegah organisasi mencapai tujuan yang telah dijalankan di dalam bisnisnya.

Keterbatasan dan peninjauan dari adanya biaya dan manfaat, pengendalian internal semata-mata dapat memastikan bahwa risiko diminimalkan seminimal mungkin sehingga organisasi dapat menerimanya. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal dimaksudkan tidak menyingkirkan semua kontinjensi. Sistem pengendalian memiliki faktor-faktor akibat kesalahan manusia dan lingkungan yang berubah sehingga tidak dapat melindungi perusahaan dari kerugian yang dihadapi sepenuhnya.

2.3 Komite Audit

Kerangka hukum Indonesia mengamanatkan setiap entitas harus memiliki adanya komite audit. Komite audit berfungsi mengevaluasi dan mengidentifikasi manajemen atas risiko kecurangan, penerapan tindakan anti-penipuan, dan penciptaan "*tone at the top*" yang sesuai (Crain et al., 2015). Pengawasan aktif oleh komite audit dapat membantu memperkuat komitmen manajemen untuk menciptakan budaya dengan "*zero tolerance*" untuk penipuan (Hightower, 2005). Evaluasi dan pengawasan komite audit tidak hanya membantu memastikan bahwa manajemen senior memenuhi tanggung jawabnya, tetapi juga dapat berfungsi sebagai penghalang bagi manajemen senior untuk terlibat dalam aktivitas penipuan (yaitu, dengan memastikan terciptanya lingkungan di mana segala usaha yang dilakukan manajemen senior dapat membujuk karyawan agar menjadi pelaku

tindakan kecurangan yang terjadi, apabila ada tindakan yang mengarah pada kecurangan tersebut yang dilakukan manajemen senior, maka karyawan dapat melaporkan kejadian kepada pihak yang tepat yaitu komite audit) (Graham, 2008).

Komite audit juga memiliki peran utama dalam membantu manajemen untuk melakukan pemenuhan kewajiban pada sistem pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan entitas agar dapat terpenuhi oleh perusahaan (Golden et al., 2006). Dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan ini, komite audit harus mempertimbangkan potensi pengabaian manajemen, pengendalian atau pengaruh lain yang tidak pantas atas proses pengungkapan yang terjadi didalam perusahaan (Moeller, 2011).

Komite audit berkewajiban untuk memonitor dan menilai tugas tanggung jawab manajemen, kegiatan audit internal, dan auditor eksternal independen karena kewajiban dan tugas tersebut berkaitan dengan proses berkewajiban atas menentukan bahwa semua masalah utama yang dilaporkan oleh aktivitas audit internal, auditor eksternal, dan penasihat luar lainnya telah diselesaikan dengan memuaskan (Hightower, 2005).

Komite audit dalam menjalankan fungsinya harus memiliki karakteristik yang menjadi dasar kepercayaan bagi anggota komite audit agar dapat bekerja secara optimal. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 55/POJK.04/2015 komite audit merupakan komite yang berasal dari luar perusahaan publik atau dari luar emiten yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk mendukung tugas serta fungsi dewan komisaris.

Jumlah rapat komite audit untuk memonitor dan mendiskusikan rapat diadakan oleh komite audit untuk mendiskusikan dan memonitor situasi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Untuk memonitor perusahaan, komite audit setidaknya melakukan pertemuan untuk memastikan kualitas dan reabilitas pelaporan perusahaan serta membahas masalah yang terdapat di perusahaan (Blue Ribbon Committee, 1999). Financial Reporting Council (2016) menjelaskan pertemuan formal komite audit ialah jantung dari pekerjaannya. Blue Ribbon Committee (1999) menyebutkan agar komite audit berfungsi efektif, pertemuan komite audit dilakukan minimal empat kali dalam setahun. Begitu pula pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 pada pasal 13 mencatumkan bahwa pertemuan komite audit setidaknya dilaksanakan minimal (1) satu kali dalam jangka waktu (3) tiga bulan, yang artinya dalam setahun komite audit melaksanakan pertemuan minimal sejumlah (4) kali.

2.4 Pengungkapan Anti Korupsi

Pengungkapan anti korupsi merupakan dasar pencegahan yang dapat diukur dan ditunjukkan kepada para pemangku kepentingan bahwa mereka berkomitmen untuk memerangi korupsi (Global Reporting Initiative, 2016). Program anti korupsi merupakan garis pertahanan pertama perusahaan terhadap korupsi (UNGC IT, 2009). Pengungkapan penuh dan transparansi dari program-program tersebut menunjukkan komitmen untuk melawan korupsi dan meningkatkan perilaku etis antara manajemen, karyawan, mitra, agen dan pihak terkait lainnya (Hoyer, 2014).

Korupsi secara luas dikaitkan dengan efek negatif, seperti kemiskinan selama transisi ekonomi, degradasi lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan demokrasi, salah alokasi investasi dan pelanggaran aturan hukum (Golden et al., 2006). Organisasi diharapkan oleh pasar, norma internasional, dan pemangku kepentingan untuk menunjukkan kepatuhan mereka terhadap integritas, tata kelola, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab (Global Reporting Initiative, 2016). Oleh karena itu, secara internal, perusahaan harus transparan dalam mengungkapkan informasi antikorupsi.

Pengungkapan anti korupsi dapat memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukannya kepada publik. Pelaporan program antikorupsi yang berlebihan juga tidak kalah pentingnya. Ini adalah kesadaran dari perusahaan bahwa mereka memiliki kewajiban pada tindakan yang dilakukannya dan menyadari akibat buruk bagi integritas, legitimasi, dan reputasi ketika menjadi sasaran skandal korupsi (ACCA, 2008). Sejumlah pedoman dan prakarsa tersedia bagi untuk membantu mereka dalam kaitannya dengan perusahaan terkait dengan memerangi penyuapan dan korupsi, yang meliputi Global Reporting Initiative, UN Global Compact, Transparency International, dan FYSE Good Index Series (ACCA, 2008).

Berdasarkan Global Reporting Index, 2016 aspek anti korupsi yaitu terdiri dari:

1. Pengungkapan 205-1 Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi

2. Pengungkapan 205-2 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi
3. Pengungkapan 205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil

2.5 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian Blanc et al. (2017), tujuan penelitian yaitu melihat bagaimana peranan dari pengungkapan anti korupsi yang diterangkan didalam perusahaan. Metode yang digunakan yaitu dengan penelitian kuantitatif dengan mereview dokumen kebijakan terkait dengan pengungkapan anti korupsi yang dilaporkan pada website entitas. Menyatakan pengendalian internal yang transparan mendapatkan pengungkapan anti-korupsi yang lebih baik dapat memainkan peran positif dalam mendorong upaya anti-korupsi yang lebih baik di tingkat perusahaan.

Penelitian Etxeberria et al., (2018), tujuan penelitian yaitu melihat pengaruh dari pengungkapan anti korupsi pada persepsi pemangku kepentingan dan sebagai alat komunikasi untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Metode yang digunakan yaitu dengan mengukur reputasi antikorupsi perusahaan dari Laporan Good Company Ranking 2013 yang diterbitkan oleh Kirchoff Consult AG tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya pengungkapan anti korupsi di dalam suatu perusahaan dapat memberikan berkorelasi positif dengan reputasi sosial di bidang anti korupsi dengan dibarengi dengan mengoptimalkan dari sistem pengendalian internal dengan memperkuat komite audit.

Vargas & Schlutz, (2016), tujuan penelitian yaitu pengenalan sistem pengungkapan keuangan yang komprehensif berdampak pada tingkat korupsi.

Metode penelitian yaitu dengan penelitian quantitative dengan melihat dari pengendalian dari korupsi yang dilakukan pada suatu negara dan indek persepsi korupsi yang diukur oleh The Heritage Foundation. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kapasitas negara untuk mengendalikan korupsi dengan menerapkan kebijakan anti korupsi dan perluasan undang-undang pengungkapan keuangan untuk tahun-tahun setelah berlakunya,

Joseph et al., (2016), tujuan penelitian yaitu melihat perbandingan peranan pengungkapan anti-korupsi yang diterapkan di Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian yaitu melakukan *content analysis* pada *Sustainability reports and annual reports*. Hasil penelitian masih terdapat kelemahan di dalam pengungkapan anti korupsi pada kedua negara pada pengawasan yaitu tingkat pengungkapan ACP di Malaysia sedikit diungkapkan dibandingkan Indonesia dan *whistleblowing* paling banyak dilaporkan.

Asiedu & Deffor, (2017), tujuan penelitian adalah melihat hubungan antara korupsi dan efektivitas komite audit serta fungsi audit internal. Metode penelitian dengan menggunakan SEM. Hasil penelitian ukuran departemen audit internal dan independensi departemen audit secara signifikan mempengaruhi efektivitas fungsi audit internal yang berdampak negatif terhadap korupsi. Kepatuhan dan pelaksanaan peraturan dan undang-undang serta independensi fungsi audit internal dan pengawasan dari komite audit akan membantu memerangi korupsi.

Tabel 2.1 Ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya yang terangkum dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

No	Study	Topik	Variable	Met0dologi	Hasil
1.	Khalil et al., (2015)	Dampak standar pengungkapan dan infrastruktur audit terhadap penyuapan pejabat publik untuk mengamankan kontrak pemerintah	<p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BRIB adalah variabel dummy yang mencerminkan apakah perusahaan menawarkan hadiah untuk mengamankan kontrak pemerintah atau tidak • BRIBPCT, menilai signifikansi suap relatif terhadap nilai kontrak <p>variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditor • SUE Auditor • Sanction Auditor • Disclosure <p>Variabel control:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LOWN • FINPER • FOWN • SIZE • LICPER • LAWORDER 	<p>Metode : multivariate logistic regression analysis</p> <p>Sampel: 15.174 companies from 24 countries included in the 2009 World Bank Enterprise Survey</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan cenderung tidak memberikan hadiah untuk mengamankan kontrak pemerintah di negara-negara yang memiliki persyaratan pelaporan keuangan yang lebih luas dan negara-negara di mana perusahaan audit menghadapi risiko litigasi dan sanksi yang lebih tinggi. Temuan juga menunjukkan bahwa perusahaan cenderung tidak menyuap birokrat jika laporan keuangan direview oleh perusahaan audit eksternal. Hasil kami signifikan secara ekonomi dan kuat untuk beberapa analisis sensitivitas. Temuan ini mendukung kebijakan tertentu yang saat ini sedang diterapkan atau dibahas untuk

No	Study	Topik	Variable	Met0dologi	Hasil
			<ul style="list-style-type: none"> POLITICAL LGDPC 		mengurangi penyuapan di sektor publik di seluruh dunia.
2.	(Le et al., 2021)	Anti-corruption disclosure	<p>Variabel dependen: Pelanggaran hukum perusahaan</p> <p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem pengendalian internal Kode etik perusahaan <p>Variabel control:</p> <ul style="list-style-type: none"> Control environment Information and Communication Monitoring 	<p>Populasi dan sampel: Perusahaan yang terdapat di vietnam tahun 2018</p> <p>Data source: survei perusahaan tahunan Kantor Statistik Umum Vietnam</p> <p>Teknik analisis: regresi logistik dan kuadrat terkecil biasa untuk menguji hipotesis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan sistem pengendalian internal berhubungan negatif dan signifikan dengan pelanggaran hukum tetapi tidak dengan suap yang dibayarkan kepada pejabat publik. Penggunaan kode etik (berupa pengungkapan anti korupsi) mengurangi pembayaran suap tetapi bukan pelanggaran hukum.
3.	Gorshunov et al., (2021)	Financial corruption	<p>Variabel independen: Quad-qualified audit committee director</p> <p>Variabel dependen: Financial corruption</p> <p>Variabel moderasi: Sox</p>	<p>Populasi dan sampel: Perusahaan yang teridentifikasi melakukan korupsi dari periode antara 18 oktober 1999 dan 5 januari 2017 (ditemukan 328 perusahaan besar as perusahaan yang korup secara finansial ditambah kelompok</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mengontrol kovariat, menemukan bahwa kehadiran direktur komite audit berkualifikasi quad mengurangi kemungkinan korupsi keuangan di perusahaan publik sebesar 72%. Dikombinasikan dengan manfaat dari sox, memiliki setidaknya satu

No	Study	Topik	Variable	Met0dologi	Hasil
				<p>pembandingan yang terdiri dari 164 perusahaan yang patuh).</p> <p>Data source: “Accounting and auditing enforcement releases (AAERS)” (sec.gov/divisions/enforce/fri actions.shtml)</p> <p>Teknik analisis Pada penelitian ini digunakan <i>logistic regression analysis</i> untuk melakukan pengujian pada hipotesis penelitian</p>	<p>direktur komite audit berkualifikasi quad menurunkan kemungkinan korupsi keuangan sebesar 92%. Hasil kami juga menunjukkan bahwa hanya memiliki satu direktur komite audit berkualifikasi empat lebih efektif daripada kombinasi kualifikasi individu yang tersebar di antara anggota komite.</p>
4.	Halдар & Raithatha, (2017)	Financial disclosure	<p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit committee • Corporate governance <p>Variabel dependen: Financial disclosure score</p>	<p>Populasi dan sampel: Terdiri dari 200 perusahaan besar yang terdaftar di India. Sampel: 153 yang memenuhi persyaratan.</p> <p>Data source: Annual report 2011-2012</p> <p>Teknik analisis Menggunakan statistic deskriptif <i>Multiple Regression model</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komite audit berperan dalam pengungkapan tindakan fraud di dalam laporan keuangan dan juga peningkatan corporate governance. • Praktik yang baik dari corporate governance dapat mengatasi kesalahan dalam pengungkapan laporan keuangan.

No	Study	Topik	Variable	Met0dologi	Hasil
5.	Pangaribuan et al., (2019)	Internal control disclosure sistem	Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> • Earnings quality • Independen audit committee • Financial expertise audit committee • Audit committee size: Variabel dependen: Internal control disclosure sistem	Populasi dan sampel: Populasi : Perusahaan perbankan di indonesia yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Sampel: 43 bank yang terdaftar di bursa efek indonesia Data source: Laporan tahunan 2013-2017 Teknik analisis <ul style="list-style-type: none"> • Describing descriptive • Correlation coefficients • Determination coefficients of significance tests • Linear regression for further • Interpretation 	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan dengan laporan kualitas laba yang tinggi lebih terbuka menyampaikan penerapan pengungkapan sistem pengendalian internal. • Perusahaan dengan karakteristik komite audit yang tinggi akan meningkatkan pengungkapan sistem pengendalian internal secara signifikan dibandingkan perusahaan tanpa komite audit • Pengawasan meningkatkan kinerja komite audit dalam kepatuhan melalui pengungkapan atas laporan keuangan
6.	Chariri et al., (2019)	Environmental Investments	Variabel independen: Institutional ownership Audit committees Types of industry and firm size Variabel dependen:	Populasi dan sampel: Populasi : Semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2015. Sampel: laporan tahunan terbit pada tahun 2009-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi lingkungan secara signifikan dipengaruhi oleh jenis industri. • Kepemilikan institusional dan komite audit tidak

No	Study	Topik	Variable	Met0dologi	Hasil
			Environmental investment Financial performance	dan mendapat penghargaan layak pada tahun Pengamatan. Data source: Laporan Tahunan Teknik analisis: Regresi logistik ordinal dan regresi linier	mempengaruhi investasi lingkungan. • Investasi lingkungan secara positif mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan
7.	Blanc et al., (2017)	Anti-corruption disclosure	Variabel independen: • Media exposure • Press freedom Variabel dependen: Ti's ratings of anti-corruption disclosure	Populasi dan sampel: Sampel: transparansi internasional (ti's) 2012 rating transparansi dalam pelaporan perusahaan Teknik analisis Descriptive statistics Multiple regression analysis Parametric correlations (pearson product-moment correlations) Non-parametric (spearman's rho)	• Ti bahwa pengungkapan anti-korupsi yang lebih baik dapat memainkan peran positif dalam mendorong upaya anti-korupsi yang lebih baik di tingkat perusahaan • Media exposure dapat membantu dalam pemberantasan korupsi dengan meningkatkan tekanan sosial terhadap perusahaan • Pengungkapan korupsi dan kinerja perusahaan yang sebenarnya mungkin tidak berhubungan positif

No	Study	Topik	Variable	Met0dologi	Hasil
8.	Blanc et al., (2019)	Disclosure anti corruption	Variabel independen: Stakeholder Organizational façade Variabel dependen: Disclosure anti corruption	Populasi dan sampel: Populasi: perusahaan multinasional di Jerman periode 2000-2011 Sampel: perusahaan multinasional yang mengalami skandal korupsi yang terungkap Data source: Laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan Teknik analisis Legitimacy analysis Organizational façade analysis Literature review	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan tahunan lebih berfokus pada pemangku kepentingan internal seperti karyawan, sedangkan laporan keberlanjutan lebih berfokus pada pemangku kepentingan eksternal seperti pemasok • Kami juga menemukan bahwa perusahaan menggunakan façade secara berbeda tergantung pada laporan mana yang sedang dianalisis
9.	Etxeberria et al., (2018)	Anti-corruption disclosure for Society reputation	Variabel independen: Anti-corruption disclosure Variabel dependen: Society reputation Variabel kontrol Firm size Financial performance	Populasi dan sampel: Populasi: Peringkat Kirchhoff termasuk 70 perusahaan Sampel: sampel terdiri dari 69 perusahaan Data source: Laporan Good Company Ranking 2013 yang diterbitkan oleh Kirchhoff	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan anti korupsi berkorelasi positif dengan reputasi sosial di bidang antikorupsi

No	Study	Topik	Variable	Met0dologi	Hasil
			Industry risk	Consult AG (2014) untuk mengukur reputasi antikorupsi perusahaan Teknik analisis: Univariate analysis Multivariate analysis Regression analysis	
10.	Vargas & Schlutz, (2016)	Pengenalan sistem pengungkapan keuangan yang komprehensif berdampak pada tingkat korupsi	Variabel independen: Financial disclosure (FD) in-law effort Variabel dependen: •Control of Corruption (COC) •Freedom from corruption (FFC)	Populasi dan sampel: 91 negara antara tahun 1996 dan 2012 untuk melihat pengenalan sistem pengungkapan keuangan yang komprehensif berdampak pada tingkat korupsi Teknik analisis: Panel data model	<ul style="list-style-type: none"> • Hampir semua variabel kontrol, kecuali ODA sebagai persentase dari GNI, mengikuti hubungan yang diprediksi dengan COC • Perluasan sistem FD memiliki efek positif dan signifikan pada COC dari waktu ke waktu • Hubungan positif dan signifikan antara kapasitas negara untuk mengendalikan korupsi dan perluasan undang-undang pengungkapan keuangan untuk tahun-tahun setelah berlakunya

No	Study	Topik	Variable	Met0dologi	Hasil
11.	Asiedu & Deffor, (2017)	Hubungan antara korupsi dan fungsi audit internal yang efektif (EIAF)	Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> • Competency of internal auditors • Independence of IAD • Effective internal audit function • Resource and size of department • Competency • Relationship between internal and external auditors • Extent of implementation of Internal Audit Act • Qualifications of staff Variabel dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Corruption 	Populasi dan sampel: 300 pekerja yang terdiri dari kepala departemen (direktur), manajer berbagai unit dan staf departemen audit internal organisasi publik Data source: kuesioner Teknik analisis: Structural Equation Model (SEM)	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran departemen audit internal dan independensi departemen audit secara signifikan mempengaruhi efektivitas fungsi audit internal yang berdampak negatif terhadap korupsi. • Kepatuhan dan pelaksanaan peraturan dan undang-undang serta independensi fungsi audit internal akan membantu memerangi korupsi administrative.
12.	Agyei-Mensah, (2017)	Hubungan antara tata kelola perusahaan, korupsi dan pengungkapan	Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> • Board size • Board independence • Institutional ownership • Board ownership • Concentration • Firm size • Auditor size 	Populasi dan sampel: 174 pengamatan tahun perusahaan antara periode 2011-2013 untuk perusahaan yang terdaftar di kedua negara Data source: Laporan Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan di negara dengan tingkat korupsi rendah lebih banyak mengungkapkan informasi berwawasan daripada negara dengan tingkat korupsi yang tinggi

No	Study	Topik	Variable	Met0dologi	Hasil
			<ul style="list-style-type: none"> • Leverage • Profitability Liquidity Variabel dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Disclosure of forward-looking information (DFLI) 	Teknik analisis Empirical analysis	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat korupsi suatu negara dipengaruhi oleh tingkat transparansi suatu negara dan perusahaan.
13.	Utami et al. (2019)	Pengaruh efektivitas komite audit dan komite audit internal terhadap pengungkapan kasus fraud dengan mekanisme moderator whistleblower	Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> • Komite audit • Audit internal Variabel dependen: Pengungkapan kasus kecurangan Variabel Moderasi: Whistleblowing sistem	Populasi dan sampel: Populasi: perusahaan yang terdaftar di BEI Sampel: penelitian ini dengan pendekatan purposive sampling tertentu Data source: Laporan tahunan perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 dan 2017 Teknik analisis: Regresi linier berganda terlebih dahulu diuji dengan asumsi klasik untuk memastikan tidak terjadi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem whistleblower dapat meningkatkan efektivitas audit internal dalam mendeteksi kasus kecurangan yang terjadi • Komite audit mempengaruhi pengungkapan kasus kecurangan • Audit internal mempengaruhi pengungkapan kasus kecurangan

No	Study	Topik	Variable	Met0dologi	Hasil
				Hipotesis di uji dengan <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	
14.	Mardani et al., (2020)	Pengungkapan kecurangan	Variabel independen: Komite Audit: Internal Audit: Ukuran Perusahaan Variabel dependen: Pengungkapan Kecurangan	Populasi dan sampel: Populasi: sampel pada penelitian ini adalah 121 Desa Sampel pada penelitian ini adalah 121 Desa Data source: kuesioner (Skala <i>Likert</i>) Teknik analisis: Analisis regresi logistik (<i>logistic regression</i>).	<ul style="list-style-type: none"> • Komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada Perusahaan • Audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada Perusahaan • Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada Perusahaan
15.	Joseph et al., (2016)	Disclosure of Anti-Corruption	Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> • Disclosure on accounting for combatting bribery • Disclosure on Board and Senior Management responsibilities • Building human resources to combat bribery 	Populasi dan sampel: Populasi: information related to corruption amongst Malaysian and Indonesian companies participated in the Indonesian Sustainability Reporting Award (ISRA) Sampel: twenty-four (24) Malaysian companies and	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kelemahan di dalam pengungkapan anti korupsi pada kedua negara pada pengawasan yaitu pada whistleblowing yang paling banyak dilaporkan dan tingkat pengungkapan ACP di Indonesia lebih banyak daripada Malaysia.

No	Study	Topik	Variable	Met0dologi	Hasil
			<ul style="list-style-type: none"> • Responsible business relationships • External verification and assurance • Codes of conduct • Whistle-blowing <p>Variabel dependen: Disclosure of Anti-Corruption</p>	<p>thirty-four (34) Indonesian companies.</p> <p>Data source: Sustainability reports and annual reports</p> <p>Teknik analisis Content analysis</p>	
16.	Nur Cahyo & Sulhani, (2017)	Hubungan antara struktur tata kelola, <i>whistleblowing sistem</i> , karakteristik komite audit, dan pengungkapan kecurangan terhadap reaksi pasar saham	<p>Variabel independen: Karakteristik komite audit Karakteristik Audit internal <i>Whistle-blowing sistem</i> Pengungkapan kecurangan</p> <p>Variabel dependen: Reaksi Saham</p>	<p>Populasi dan sampel: Populasi: perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 Sampel: dengan <i>purposive sampling</i> dengan 57 sampel</p> <p>Data source: Annual report</p> <p>Teknik analisis Uji Statistik Deskriptif Uji Indikator dengan PLS-<i>Algorithm</i> Uji Indikator <i>Outer Loadings (SMART-PLS)</i> Uji Indikator <i>Cross Loadings</i> Uji Indikator <i>Average Variance Extracted (AVE)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik komite audit berpengaruh negatif terhadap pembentukan sistem <i>whistleblowing</i> suatu perusahaan. Karakteristik audit internal tidak berdampak pada penerapan sistem <i>whistleblowing</i>. • Penerapan sistem <i>whistleblowing</i> tidak berpengaruh pada pengungkapan penipuan. • Fraudulent disclosure berpengaruh negatif signifikan terhadap reputasi perusahaan. Akibatnya, perusahaan yang curang

No	Study	Topik	Variable	Met0dologi	Hasil
				Uji Indikator <i>Composite Reliability</i>	akan berdampak meredam respon pasar saham.
17.	Ahnan, (2020)	Dampak dari pengungkapan kecurangan korupsi, internal control	Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan Kecurangan • Internal Control • Teknologi Informasi Variabel dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Financial Performance • Non-Financial Performance Variabel moderasi: Corporate Governances	Populasi dan sampel: Populasi: data laporan keuangan sekunder dari perusahaan perbankan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel: 48 bank Data source: Laporan keuangan Teknik analisis <ul style="list-style-type: none"> • Panel data method (pooled regression) dengan menggunakan alat Eviews software • Chow Test and the Hausmann Test 	<ul style="list-style-type: none"> • Corporate governance mempengaruhi sejumlah aspek model bisnis termasuk dalam menetapkan tujuan bisnis • Pengungkapan kecurangan, pengendalian internal dan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, baik kinerja keuangan maupun non keuangan dan corporate governance memperkuat kinerja keuangan tetapi memperlemah kinerja non keuangan

Sumber: Data sekunder yang diolah (2022)

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Sistem Pengendalian Internal dan Pengungkapan Anti korupsi

2.6.1.1 Lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi

Lingkungan pengendalian dapat diketahui telah dijalankan dengan baik didalam perusahaan salah satunya dengan perusahaan melakukan pengungkapan anti korupsi (ACCA, 2008). Berdasarkan teori legitimasi menjelaskan pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan menandakan bahwa perusahaan menjalankan bisnis dengan baik sehingga memberikan informasi terkait pengendalian yang dilakukannya oleh manajemen berupa pengungkapan anti korupsi untuk menghindari terjadinya tindakan kecurangan didalam perusahaan. Kecurangan terjadi karena lemahnya dari lingkungan pengendalian sehingga tindakan kecurangan seperti korupsi dapat terjadi (Manning, 2005). Sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan yang mengungkapkan informasi kepada publik dapat meningkatkan kepercayaan publik (Delgado & Castelo, 2013). Salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik yaitu dengan melakukan pengungkapan anti korupsi.

Lingkungan pengendalian berperan bagi perusahaan agar dapat melakukan pengungkapan anti korupsi yang digunakan sebagai sarana untuk memerangi korupsi di sektor bisnis (Le et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Rahman et al., 2019) menyatakan bahwa efektifitas lingkungan pengendalian yang efektif dapat mencegah fraud masih terbatas, sedangkan penelitian lainnya menjelaskan

bahwa lingkungan pengendalian sangat efektif untuk mencegah terjadinya korupsi (Batts, 2022; Le et al., 2021)

Hipotesis 1.1 : lingkungan pengendalian berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi

2.6.1.2 Penilaian risiko berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi

Penilaian risiko yang lemah dapat mengakibatkan tindakan kecurangan seperti korupsi (Manning, 2005). Penilaian risiko dilakukan untuk dapat mengidentifikasi risiko yang terjadi sehingga perusahaan dapat menghindari risiko yang terjadi. Penilaian risiko termasuk didalamnya pengungkapan anti korupsi yang terjadi beserta mitigasi yang dilakukan didalam perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Teori legitimasi menjelaskan bahwa peranan perusahaan untuk dapat menjelaskan dan mengungkapkan informasi terkait penilaian risiko yang dilakukan perusahaan kepada publik ditujukan untuk tujuan dan keberlangsungan dari perusahaan (Delgado & Castelo, 2013). Penilaian risiko yang dilakukan untuk dapat mengidentifikasi risiko yang terjadi dan memastikan bahwa manajemen memang telah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Penilaian risiko perlu dilakukan untuk dapat mengungkapkan anti korupsi dan sebagai sarana untuk memerangi korupsi di sektor bisnis (Le et al., 2021), efektifitas penilaian risiko sangat efektif untuk mencegah terjadinya korupsi (Batts, 2022).

Hipotesis 1.2 : Penilaian risiko berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi

2.6.1.3 Informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi

Informasi dan komunikasi di perlukan untuk dapat mengkomunikasi kebijakan yang dijalankan didalam perusahaan kepada publik sehingga informasi yang diterima dapat di andalkan, kebijakan yang harus di informasikan kepada publik didalam perusahaan. Pengungkapan yang lebih tinggi dapat didorong untuk memberikan citra yang baik di mata pemangku kepentingan, terutama investor yang ingin berinvestasi di perusahaan (Faisal et al., n.d.). Teori legitimasi menjelaskan bahwa peranan perusahaan untuk dapat menjelaskan dan mengungkapkan informasi kepada publik ditujukan untuk tujuan dan keberlangsungan dari perusahaan (Delgado & Castelo, 2013). Hal itu karena manajemen didalam perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi dan mengkomunikasikan pengungkapan anti korupsi dengan sukarela merupakan alat untuk mencegah terjadinya korupsi di dalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman et al., (2019) menyatakan bahwa efektivitas peranan komponen informasi dan komunikasi pada sistem pengendalian internal dalam pencegahan fraud masih terbatas. Sedangkan berdasarkan penelitian lainnya ditemukan bahwa informasi dan komunikasi bisa sangat efektif dalam mengatasi korupsi (Batts, 2022; Le et al., 2021).

Hipotesis 1.3 : Informasi dan komunikasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi

2.6.1.4 Aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi

Aktivitas pengendalian dilakukan untuk menghindari dan mengatasi risiko untuk mencapai tujuan perusahaan. aktivitas pengendalian memiliki pengaruh besar

terhadap kinerja karena aktivitas pengendalian ini menjadi acuan atau pedoman dalam melakukan aktivitas didalam perusahaan. aktivitas pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan mencegah terjadinya fraud dengan melakukan pengungkapan anti korupsi yang ada didalam perusahaan (Batts, 2022). Teori legitimasi menjelaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh publik, agar terhindar dari ancaman legitimasi. Teori legitimasi memberikan pedoman agar aktivitas pengendalian yang dilakukan didalam perusahaan sesuai dengan harapan publik. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa aktivitas pengendalian bisa sangat efektif dalam mengatasi korupsi (Batts, 2022; Le et al., 2021), dan penelitian lainnya menyatakan bahwa efektivitas peranan aktivitas pengendalian dalam pencegahan fraud masih terbatas (Rahman et al., 2019).

Hipotesis 1.4 : Aktivitas pengendalian berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi

2.6.1.5 Pengawasan berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi

Pengawasan mengacu pada proses yang menilai dan mengevaluasi efektivitas proses, efisiensi dan kepatuhan dalam menangani tujuan pengendalian internal (Moeller, 2011). Pengawasan yang dilakukan dapat mencegah terjadinya tindakan fraud. Teori legitimasi menjelaskan bahwa persepsi publik dapat muncul dengan pengawasan yang dilakukan dengan baik, bentuknya dapat berupa pengendalian internal yang dilakukan dengan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku seperti kebijakan untuk melakukan pengungkapan anti korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman et al., (2019)

menyatakan bahwa efektivitas pengawasan pada sistem pengendalian internal dalam pencegahan fraud masih terbatas. Sedangkan berdasarkan penelitian lainnya ditemukan bahwa pengawasan pada sistem pengendalian internal bisa sangat efektif dalam mengatasi korupsi (Batts, 2022; Le et al., 2021).

Hipotesis 1.5 : Pengawasan berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi

2.6.2 Komite Audit Memperkuat Pengaruh Sistem Pengendalian Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi

2.6.2.1 Komite audit mempengaruhi lingkungan pengendalian terhadap pengungkapan anti korupsi

Lingkungan pengendalian harus diciptakan dan dipelihara untuk menimbulkan suatu perilaku yang positif dan kondusif dalam upaya menerapkan sistem pengendalian internal di dalam lingkungan kerja (Batts, 2022). Komite audit yang bertugas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dapat dilihat bagaimana komite audit tersebut dalam melakukan pengendalian pada lingkungan pengendalian di perusahaan untuk melakukan pengawasan yang dilakukannya melalui evaluasi terhadap lingkungan pengendalian didalam perusahaan. Hal tersebut di perkuat dengan penjelasan dari teori agensi bahwa agen mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian didalam perusahaan untuk dapat meningkatkan kepercayaan pada prinsipal, hal tersebut dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi dari komite audit sebagai pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab tersebut. Berdasarkan penelitian dari (Lawson et al., 2017) menjelaskan bahwa lingkungan pengendalian internal memiliki peranan yang

sangat penting didalam perusahaan dimana membutuhkan suatu pengawasan dan perhatian untuk dapat dijalankan dengan baik.

Hipotesis 2.1 : Komite audit memperkuat pengaruh lingkungan pengendalian terhadap pengungkapan anti korupsi

2.6.2.2 Komite audit mempengaruhi penilaian risiko terhadap pengungkapan anti korupsi

Penilaian risiko wajib dilakukan meliputi 2 hal, yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko. Setiap kegiatan ataupun aktivitas pasti akan ada risiko yang dihadapi (Batts, 2022). Dalam suatu kegiatan organisasi, perlu adanya penilaian risiko terhadap organisasi tersebut. Penilaian risiko sangat perlu dilakukan agar nantinya bisa diatasi maupun dikurangi dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Penilaian risiko termasuk didalamnya risiko terhadap terjadinya suatu tindakan fraud. Perusahaan melakukan pengungkapan anti korupsi untuk melakukan pertanggungjawaban kepada publik. Pengungkapan ini termasuk pada pengendalian untuk melakukan penilaian risiko yang terjadi dengan memitigasi risiko tersebut. Berdasarkan penjelasan dari teori agensi dengan menggunakan pengungkapan sukarela agar dapat mencegah terjadinya asimetri informasi yang terjadi. Perusahaan sebagai agen yang membangun sebuah sistem pengendalian internal mampu memberikan keyakinan bahwa pengendalian yang dilakukan telah dilaksanakan dengan baik dengan komite audit sebagai pengawas terhadap penilaian risiko agar dapat menghasilkan pengungkapan anti-korupsi yang dibutuhkan. Berdasarkan penelitian dari penilaian risiko yang dilakukan didalam perusahaan dibutuhkan untuk mencegah terjadinya tindakan fraud (Lawson et al.,

2017) untuk melakukan pengungkapan didalam perusahaan dengan komite audit untuk melakukan pemantau dan pengawasannya (Beasley et al., 2009).

Hipotesis 2.2 : Komite audit memperkuat pengaruh penilaian risiko terhadap pengungkapan anti korupsi

2.6.2.3 Komite audit mempengaruhi informasi dan komunikasi terhadap pengungkapan anti korupsi

Informasi harus diidentifikasi, dicatat, dan dikomunikasikan dengan bentuk dan waktu yang tepat. Informasi harus dikomunikasikan dengan efektif agar meningkatkan kinerja dari manajemen maupun semua anggota di dalam perusahaan dan juga untuk pihak yang membutuhkan informasi yang ada di perusahaan dalam pembuatan keputusan (Batts, 2022) seperti para investor untuk mendapatkan keyakinan dalam menilai kinerja didalam perusahaan seperti dengan melakukan pengungkapan anti korupsi yang dijalankan didalam perusahaan. Berdasarkan penelitian dari Marquette (2014) menjelaskan bahwa informasi dan komunikasi yang jelas tentang upaya pengungkapan antikorupsi sangat di butuhkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan.

Komite audit berperan untuk meninjau informasi (Beasley et al., 2009) sehingga dapat melakukan pengungkapan anti korupsi dapat berjalan. Komite audit berfungsi sebagai pengawas yang efektif untuk dapat memberikan pengawasan agar informasi dan komunikasi terhadap informasi dapat diberikan dengan layak dan sesuai (Beasley et al., 2009).

Hipotesis 2.3 : Komite audit memperkuat pengaruh informasi dan komunikasi terhadap pengungkapan anti korupsi

2.6.2.4 Komite audit mempengaruhi aktivitas pengendalian terhadap pengungkapan anti korupsi

Komponen aktivitas pengendalian mengacu pada kebijakan, prosedur, dan praktik yang memastikan manajemen bahwa tujuan tercapai dan strategi mitigasi risiko dijalankan secara efektif (Jokipii, 2010). Aktivitas pengendalian ini menjadi pedoman bagi karyawan dalam melakukan kinerjanya dalam aktivitas didalam perusahaan.

Aktivitas pengendalian yang dilakukan dalam pengungkapan anti korupsi dapat memberikan jaminan bahwa aktivitas pengendalian yang dilakukan didalam perusahaan telah dilakukan (Gupta, 2006). Oleh karena itu, peranan komite audit perlu ditingkatkan untuk pengawasan, kontrol internal yang ditingkatkan, penerapan kebijakan pelaporan tindakan fraud adalah salah satu teknik deteksi dan pencegahan fraud yang paling efektif yang digunakan di sektor publik (Muhamad, 2020). Tindakan ini merupakan wujud komitmen untuk mencegah fraud didalam perusahaan yang dapat dilakukan dengan melakukan pengungkapan dari anti korupsi.

Teori agensi menjelaskan pengungkapan sukarela yang dilakukan untuk mencegah terjadinya asimetri informasi dengan melakukan pengungkapan informasi kepada publik salah satunya dengan melakukan pengungkapan anti korupsi. Perusahaan yang bertindak sebagai agen melakukan pengendalian terhadap aktivitas pengendalian yang ada didalam perusahaan untuk memberikan

pertanggung jawaban mereka dalam menjalankan perusahaan dengan diperkuat dengan adanya komite audit sebagai pengawas terhadap aktivitas pengendalian didalam perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Etxeberria et al., 2018; Joseph et al., 2016) menjelaskan bahwa komite audit dengan diperkuat dengan aktivitas pengendalian dapat membantu dalam pengungkapan tindakan fraud yang dilaporkan didalam perusahaan. efektifitas dari komite audit juga dapat memerangi tindakan korupsi yang terjadi (Asiedu & Deffor, 2017) dan lemahnya komite audit dapat mengakibatkan dilakukannya façade (Blanc et al., 2019), sehingga pengungkapan anti korupsi tidak diungkapkan dengan baik.

Hipotesis 2.4 : Komite audit memperkuat pengaruh aktivitas pengendalian terhadap pengungkapan anti korupsi

2.6.2.5 Komite audit mempengaruhi pengawasan terhadap pengungkapan anti korupsi

Pengawasan yang dilakukan dapat mencegah terjadi praktik-praktik korupsi yang dilakukan (Hess & Hess, 2009). Pengawasan yang dilakukan didalam perusahaan membantu dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian yang memadai didalam perusahaan. efektifitas dari pengawasan yang dilakukan oleh manajemen didalam perusahaan dilakukan untuk menghindari dari adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan regulasi atau kebijakan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan ini perlu dilakukan lagi ini dievaluasi lagi oleh komite audit terkait bagaimana manajemen didalam perusahaan dalam melakukan pengawasannya mereka. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan kerercayaan bagi para pihak

yang mengandalkan manajemen untuk menjalankan perusahaan dan dievaluasi oleh komite audit.

Teori agensi menjelaskan bahwa antara agen dan prinsipal saling memiliki keterkaitan. Dimana agen akan melakukan tugasnya untuk menjalankan perusahaan sebagai mana mestinya dengan melakukan pengawasan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan para prinsipal. Para prinsipal dapat memastikan lagi bahwa pengawasan yang dilakukan agen memang telah berjalan semestinya dengan adanya komite audit yang melakukan pemantauan dan juga pengawasan terhadap agen (Deloitte, 2018). Apabila pengawasan perusahaan melemah, tata kelola perusahaan dan fungsi audit menjadi kurang efektif, sehingga menimbulkan peluang untuk terjadinya fraud (Le et al., 2021) dan pengungkapan dari antikorupsi pun sulit dilakukan pengungkapannya.

Komite audit dalam menjalankan fungsinya membutuhkan komponen sistem pengendalian internal salah satunya yaitu pengawasan. Komite audit dengan diperkuat dengan pengawasan dapat membantu mewujudkan pengungkapan anti korupsi yang dilaporkan perusahaan kepada publik (Joseph et al., 2016; Etxeberria et al., 2018). Efektifitas dari komite audit juga dapat memerangi tindakan korupsi yang terjadi (Asiedu & Deffor, 2017) dan lemahnya komite audit yang ada di dalam perusahaan juga dapat mengakibatkan dilakukannya façade (Blanc et al., 2019) sehingga pengungkapan anti korupsi tidak dilaporkan secara benar.

Hipotesis 2.5 : Komite audit memperkuat pengaruh pengawasan terhadap pengungkapan anti korupsi

2.7 Model penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis tampilan model penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran

